KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

LAPORAN
PELAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
2014

PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik menjadi sarana penting untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara maupun aktivitas badan publik lainnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini kemudian yang dituangkan dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Oleh karena itu, sebagai upaya untuk menjalankan amanah undang-undang tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu badan publik, pada akhir tahun 2013 melalui Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi, membentuk satu bagian baru yaitu Bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP). Bagian ini melengkapi bagian lain yang sudah ada sebelumnya di Biro Humas KPK yaitu Bagian Protokoler dan Bagian Pemberitaan.

Seiring dengan semangat transparansi dan keinginan untuk memberikan kemudahan kepada publik dalam mengakses informasi mengenai kelembagaan serta tugas, pokok dan fungsinya, pada tahun 2014 ini PIKP KPK selain fokus dalam pengolahan informasi internal untuk dikemas menjadi informasi publik, juga secara intensif melakukan inovasi dalam diseminasi Informasi tersebut, supaya publik lebih tertarik untuk mengaksesnya.

Selain layanan langsung, telepon maupun email, PIKP KPK juga menyebarluaskan Informasi dan pengetahuan melalui media sosial, portal ACCH *(Anti-Corruption Clearing House)*, dan Perpustakaan. Dengan berbagai saluran diseminasi tersebut diharapkan Informasi dan pengetahuan dapat tersebar secara optimal kepada berbagai elemen masyarakat.

Beberapa pencapaian layanan publik selama 2014 antara lain yaitu pemenuhan atas permintaan informasi publik yang ditujukan kepada KPK baik langsung, email, maupun melalui telepon bisa dipenuhi 100%. Artinya, semua permintaan informasi yang diajukan, bisa sepenuhnya diberikan kepada masyarakat. Kemudian antusiasme masyarakat di dunia maya terhadap Informasi dan pengetahuan tentang antikorupsi juga menunjukkan lonjakan yang sangat signifikan, terlihat dari peningkatan jumlah follower di twitter dan fans di halaman fanpage facebook KPK. Begitu juga jumlah pengakses portal ACCH http://acch.kpk.go.id yang mengalami peningkatan drastis. Tidak terkecuali, Perpustakaan KPK yang selain memberikan layanan langsung kepada para pengunjung baik internal pegawai KPK maupun eksternal juga menyediakan halaman website http://perpustakaan.kpk.go.id/ yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun.

Peningkatan jumlah pengakses Informasi merupakan sinyal menguatnya kepedulian masyarakat terhadap isu pemberantasan korupsi itu sendiri. Tentunya hal ini menjadi sebuah tantangan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai badan publik untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publiknya dalam rangka turut mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.

Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

DAFTAR ISI

01 GAMBARAN UMUM

03 INFORMASI PUBLIK KPK 2014

10 SENGKETA INFORMASI PUBLIK

10 KENDALA DALAM PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK KPK 2014

10 RENCANA TINDAK LANJUT

11 LAMPIRAN

GAMBARAN UMUM

Untuk memastikan bahwa setiap keputusan, langkah, atau tindakan, dan pemrosesan dilaksanakan secara efektif, konsisten, standar, dan sistematis maka pada tahun 2014 ini Bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Humas KPK membuat sistem standar operasional (*Standard Operating Procedures*/ SOP) untuk setiap proses pekerjaannya, termasuk Pelayanan Informasi Publik.

Dalam SOP Pelayanan Informasi Publik ini terdiri dari enam *bussiness process* yaitu penerimaan demo, layanan penerimaan penelitian mahasiswa, layanan sirkulasi Informasi (langsung, email, telepon), pengelolaan mading, pengumpulan dan pengolahan laporan kegiatan humas, serta pengumpulan dan pengolahan data Informasi di biro/direktorat KPK.
Untuk melakukan koordinasi awal dalam pengumpulan dan pengkatagorian Informasi, unit PIKP melakukan konsinyering dengan para PIC Informasi di setiap biro/direktorat. Kemudian, tahap berikutnya adalah melakukan uji konsekuensi terhadap Informasi-informasi yang dikecualikan, kemudian, yang sampai dengan saat ini masih berlangsung, adalah proses pengesahan atas Informasi yang dikecualikan tersebut.

Pada tahun 2014, permintaan informasi yang datang ke KPK sangat beragam, mulai dari penelitian akademik, baik tugas belajar, skripsi, tesis, desertasi dan penelitian lain yang umumnya bersubyek hukum dan korupsi juga permintaan modul-modul pembelajaran dan perangkat sosialisasi oleh para pegiat antikorupsi dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat umum. Tidak sedikit pula rekan-rekan media yang membutuhkan Informasi terkait lembaga, tugas dan fungsi KPK.

Tanpa datang langsung masyarakat sebenarnya juga bisa mengakses berbagai informasi mengenai Pelayanan Informasi Publik KPK melalui website www.kpk.go.id, karena disini telah tersedia kanal khusus mengenai layanan publik. Disamping website tersebut, Humas KPK juga mengembangkan Portal Antikorupsi ACCH (Anti-Corruption Clearing House) yang berisi tentang literasi antikorupsi, yang tidak hanya bersumber dari KPK namun juga stakeholder-stakeholder lainnya. Sebagai upaya untuk menyebarluaskan eksistensi portal ini, KPK menggelar roadshow ke beberapa kota di Indonesia dengan menggandeng para akademisi, tokoh masyarakat, serta awak media.

Penyampaian Informasi publik juga dilakukan melalui Perpustakaan KPK yang secara langsung melayani para pengunjung dengan koleksi 10.000 judul subjek khusus korupsi dan subjek lain yang terkait. Perpustakaan ini juga mempunyai website yang akan memudahkan para visitor untuk melihat katalog buku tanpa harus datang langsung.

Seiring dengan semakin masifnya perkembangan jejaring sosial, Humas KPK juga memanfaatkan dua platform terbesar media sosial yakni twitter dan facebook untuk melakukan diseminasi Informasi di dunia maya. Upaya ini disambut respon positif oleh masyarakat, terlihat dari *traffic* pengakses yang setiap periodenya selalu mengalami peningkatan.

Tepat setahun KPK memilki radio *streaming* Kanal KPK, kali ini pada 17 Agustus 2014 KPK me-*launching* TV Kanal KPK, yang diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif sumber Informasi dan pengetahuan tentang antikorupsi yang dibutuhkan oleh publik. Dengan berbagai saluran Informasi yang dikelola oleh KPK inilah diharapkan masalah keterbatasan akses Informasi publik sudah tidak lagi menjadi kendala.

Sarana dan Prasarana

Ruang Pelayanan Informasi Publik (PIP) terletak di lantai 1 *(public area)* gedung KPK, yang didesain secara menarik agar dapat memberikan kesan "hangat" kepada para tamu yang datang. Semua layanan bersifat gratis dan tidak dipungut biaya apapun, termasuk untuk penggantian materi informasi yang diminta oleh masyarakat. KPK berupaya untuk memenuhi permintaan kebutuhan data dan informasi dengan diarahkan ke website terkait atau secara *softcopy* terlebih dahulu, kecuali memang jika yang diperlukan adalah data *hardcopy.*

Selain itu, di lobi tamu dan lobi pegawai juga disediakan ACCH Station yang dapat digunakan untuk mengakses semua website KPK dan website lembaga lain yang terkait. Pada area publik ini juga dipasang papan pengumuman (Media Informasi KPK), yang memuat informasi mengenai tata cara dan alur permintaan informasi KPK serta informasi lainnya.

Seorang pengunjung yang sedang dipandu Petugas Informasi dalam menggunakan fasilitas ACCH *Station* untuk mengakses saluran informasi KPK.

Untuk memfasilitasi para pengunjung yang ingin membaca atau meminjam literasi antikorupsi, disediakan ruang Perpustakaan yang terletak di lantai 2 gedung KPK *(area public)*. Hingga saat ini Perpustakaan KPK memiliki sekitar 10.000 judul koleksi buku tentang korupsi dan subjek lain yang terkait.

Sebagai sarana komunikasi, Humas menyediakan beberapa saluran pelayanan informasi sebagai berikut:

- Layanan Langsung
  Petugas Pelayanan Informasi Publik Gedung KPK lantai 1 Jln. H.R Rasuna Said Kav. C-1 Jakarta 12920
- Surat
  Pengiriman surat dialamatkan kepada Biro Humas, Gedung KPK Jln. H.R Rasuna Said Kav. C-1 Jakarta 12920
- Kontak
  No. telp. 021-2557 8498 dan Fax: 021-5290 5592
- Email
  informasi@kpk.go.id
- Website
  - www.kpk.go.id dan http://m.kpk.go.id
  - http://acch.kpk.go.id
  - http://perpustakaan.kpk.go.id
- Media Sosial
  - Twitter : @KPK_RI
  - Facebook : Komisi Pemberantasan Korupsi
- Kanal KPK
  - Radio : www.kpk.go.id/kanalkpk/radio
  - TV : www.kpk.go.id/kanalkpk/tv

Anggaran

Anggaran Pelayanan Informasi Publik untuk tahun 2014 menggunakan mata anggaran APBN yang terdapat pada Biro Humas.

sumber Daya Manusia

Personel Biro Humas yang menangani Pelayanan Informasi Publik pada 2014, yaitu satu (1) Kepala Bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik, satu (1) orang fungsional dan tiga (3) staff administrasi.

INFORMASI PUBLIK KPK 2014

Pelayanan Informasi Publik

Selama tahun 2014, Biro Humas menerima permintaan pelayanan informasi publik yang telah diregister sebanyak 1922 permintaan yang dikirimkan melalui surat, email, telepon maupun datang langsung, hal ini mengalami penurunan dari tahun 2013 yaitu sebanyak 2364 permintaan. Seluruh permintaan informasi dapat dipenuhi, karena informasi yang diminta adalah informasi yang bersifat terbuka untuk umum (publik). Penurunan permintaan informasi ini bisa disebabkan karena semakin optimalnya saluran-saluran Informasi KPK lainnya seperti website dan media sosial.

Pelayanan informasi oleh Petugas PIP kepada salah seorang pengunjung yang mengajukan permohonan data dan informasi publik di KPK.

Dari total 1922 permintaan informasi tersebut, 587 permintaan melalui telepon, 1007 permintaan melalui email, 72 permintaan melalui surat, dan 256 permintaan Informasi yang datang secara langsung.

Berikut adalah rincian permintaan Informasi tersebut.

No	Periode	Pelayanan Informasi				Total
		Telepon	Email	Surat	Langsung	
1	Januari	76	72	3	8	159
2	Februari	55	68	2	19	144
3	Maret	60	70	7	37	174
4	April	47	94	8	5	154
5	Mei	38	186	4	2	230
6	Juni	20	71	5	15	111
7	Juli	6	50	1	12	69
8	Agustus	33	74	6	22	135
9	September	25	64	5	20	114
10	Oktober	43	98	13	41	195
11	Nopember	96	77	15	37	225
12	Desember	88	83	3	38	212
	Total	**587**	**1007**	**72**	**256**	**1922**

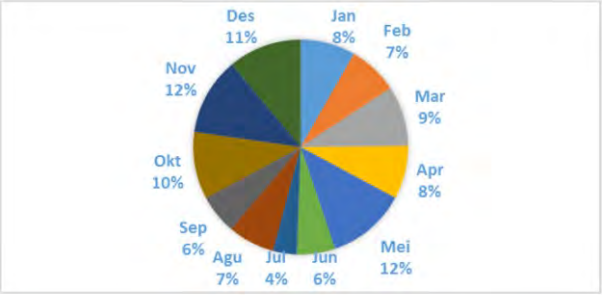

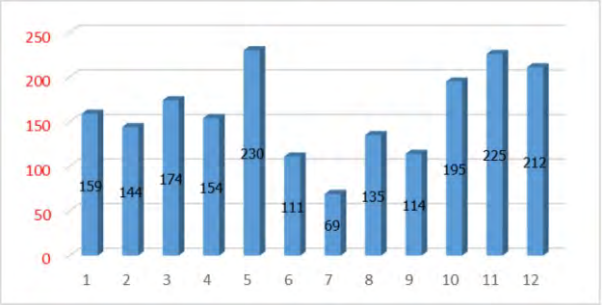

Rincian pelayanan informasi publik berdasarkan saluran permintaan.

No	Sarana	Jumlah
1	Telepon	587
2	Email	1007
3	Surat	72
4	Langsung	256
	Total	**1922**

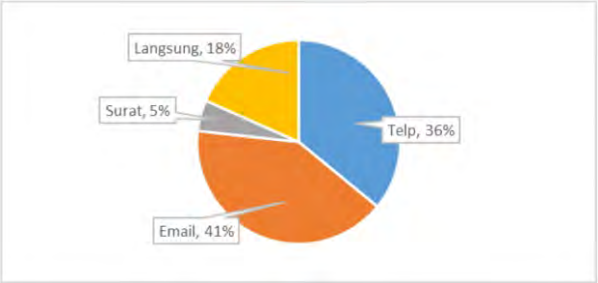

Dari keseluruhan permintaan informasi tersebut, terdapat 1 permintaan yang dipenuhi tidak tepat waktu, yaitu permintaan yang diajukan melalui surat pada 2 Juni 2014, baru dapat dipenuhi pada 26 Juni 2014 (18 hari kerja). Hal ini melebihi batas waktu yang telah ditentukan menurut UU Keterbukaan Informasi Publik, yakni 10 + 7 hari kerja.

Selain permintaan Informasi publik diatas, unit PIP KPK juga melayani permohonan penelitian, baik dari siswa, mahasiswa, maupun para pegiat antikorupsi lainnya. Tercatat 115 permohonan penelitian yang diajukan selama 2014.

Anti-Corruption Clearing House (ACCH)

Anti-Corruption Clearing House (ACCH) merupakan salah satu unit di bawah Bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Biro Humas KPK yang dibentuk sejak tahun 2009. Program ACCH (http://acch.kpk.go.id/) dirancang sebagai sumber pengetahuan dan informasi yang terdistribusi secara terbuka untuk publik *(public knowledge management)* dalam upaya membangun semangat dan visi antikorupsi.

Keterbukaan informasi di satu sisi membawa manfaat penting dalam mendidik dan memperluas wawasan masyarakat, namun di sisi lain banyaknya informasi yang hadir membuat masyarakat harus sangat selektif dalam mencerna ragamnya pemberitaan. ACCH hadir untuk menjembatani hal tersebut agar masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai korupsi dan antikorupsi dari sumber resmi dan dapat dipercaya.

Di dalam portal ini, terdapat menu-menu utama antara lain Edukasi, Penindakan, dan Publikasi. Pada Menu Edukasi terdapat modul-modul pembelajaran, serta media sosialisasi lain dalam berbagai bentuk *audio visual*. Di Menu Penindakan, menyajikan Informasi tentang data-data kasus yang ditangani oleh KPK. Sedangkan pada Menu Publikasi, menyuguhkan hasil-hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh KPK. Selain menu-menu tersebut, terdapat Informasi-informasi lain yang dapat diakses disini, seperti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Jejak Kasus, Sejarah Pemberantasan Korupsi, dan sebagainya. Pada setiap bulannya, ACCH juga mengangkat headline yang secara khusus dan komprehensif membahas suatu tema, yang digali dari berbagai sumber Informasi dan wawancara kepada para narasumber yang berkompeten.

Hasil pemetaan yang dilakukan Humas KPK menunjukkan, eksistensi ACCH belum popular di masyarakat. Oleh karena itu sebagai upaya untuk menyosialisasikan portal ini dilakukan *roadshow* ke berbagai daerah guna memperluas jangkauan pemanfaatan ACCH sebagai pusat pengetahuan anti korupsi, dengan mengangkat *tagline* "Langkah Cerdas Cegah Korupsi".

Selama 2014, sebanyak 104 jenis konten yang telah diunggah dan diakses oleh 315.586 pengakses.

Statistik kunjungan Portal ACCH (acch.kpk.go.id) tahun 2014
Periode 1 Januari 2014- 31 Desember 2014

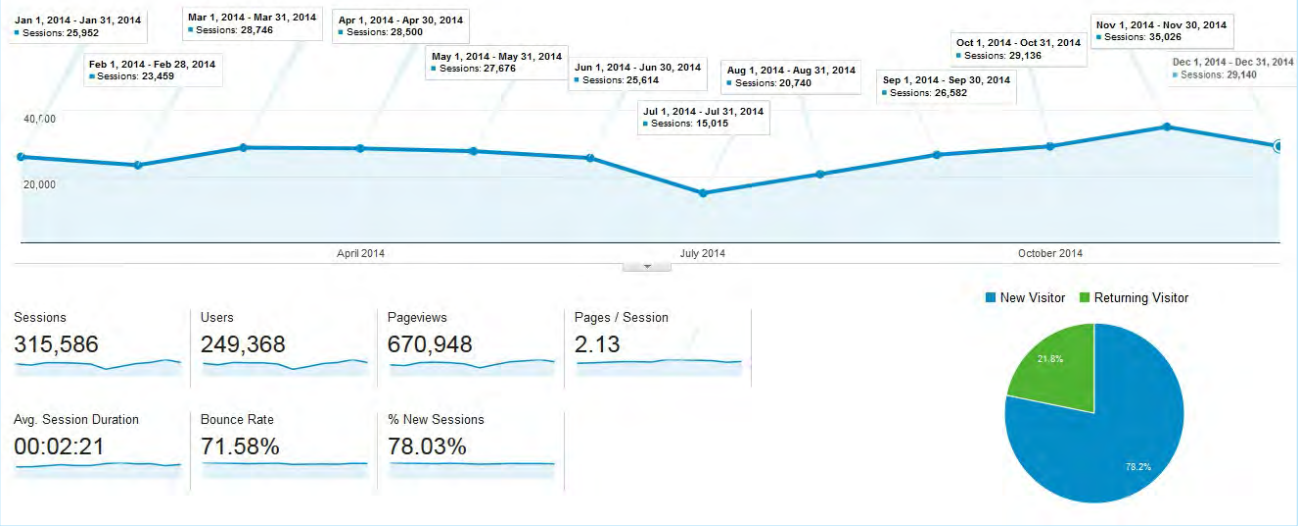

Pada 2014 ini, *roadshow* ACCH telah mengunjungi 5 kota di Indonesia antara lain Surabaya, Palembang, Mataram, Makassar, dan Malang dengan melibatkan peserta dari berbagai kalangan akademik, tokoh masyarakat, maupun awak media.

Testimoni dari para peserta roadshow ACCH yang dituangkan dalam kertas-kertas dan ditempel pada selembar papan.

Penyampaian materi oleh Johan Budi SP, Kepala Biro Humas KPK dalam rangkaian kegiatan roadshow ACCH di Kota Malang, 14 Oktober 2014.

Perpustakaan

Penyampaian informasi publik juga dilakukan melalui Perpustakaan KPK yang membuka layanan setiap hari kerja mulai pukul 09.00 s.d 16.00 WIB dengan koleksi sekitar 10.000 judul subjek khusus bidang korupsi dan subjek lain yang terkait. Perpustakaan ini juga mempunyai website http://perpustakaan.kpk.go.id yang akan memudahkan para visitor untuk melihat katalog buku tanpa harus datang langsung. Pada 2014, Perpustakaan KPK telah mengolah 1.069 koleksi baru yang terdiri dari 744 pengolahan buku dan 325 pengolahan publikasi lokal.

Kunjungan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (KPK-nya Malaysia), ke Perpustakaan KPK dalam rangkaian studi banding ke media kehumasan di KPK pada 16-17 Oktober 2014.

Selain itu, untuk menjalin hubungan kerjasama dalam pengumpulan publikasi lokal bidang korupsi dan subjek terkait, selama 2014, Perpustakaan KPK mendatangani MoU dengan 7 Universitas antara lain Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Negeri Semarang, UNIKA Soegijapranata Semarang, Universitas Hasanuddin Makassar, dan Universitas Andalas Padang.

Media Sosial

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, tuntutan penggunaan jejaring sosial sebagai media informasi juga semakin tinggi. Oleh karena itu, KPK memanfaatkan dua *platform* terbesar media sosial saat ini yaitu twitter dan facebook untuk mengelola dan menyebarluaskan informasi publik kepada masyarakat.

Melalui akun twitter @KPK_RI, selama 2014 telah mengunggah 46 konten (kultwit) dengan 1.133.000 followers.

Sumber: twittercounter, 2014

Berikut ini adalah trend following dan follower twitter @KPK_RI selama sebulan terakhir (Desember 2014) yang menunjukkan lonjakan jumlah follower yang tinggi dan stabil.

Selain twitter, unit PIKP Humas KPK juga mengelola akun fanpage facebook Komisi Pemberantasan Korupsi, yang telah mempunyai 920.093 *fans* dengan 91 konten yang telah berhasil diunggah selama 2014.

Trend kenaikan fans pada facebook Komisi Pemberantasan Korupsi pada 3 bulan terakhir (Oktober, November, dan Desember) yang mencapai 920.093 *likes* di akhir tahun.

Melalui media sosial ini juga dilakukan kampanye antikorupsi dan nilai-nilai luhur bangsa kepada masyarakat yang dikemas melalui kuis online. Antara lain "Dukung Perempuan Cegah korupsi" dan "17 Agustus-an".

Poster promo untuk mengajak pengguna media sosial mengirimkan foto dukungan kepada para perempuan dalam mencegah korupsi, dalam rangka memperingati hari Kartini 21 April.

Dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, sosial media KPK mengajak para netizen untuk mengirimkan foto-foto kegiatan 17-an di sekitar mereka.

Berikut ini adalah beberapa foto kiriman dari *netizen* ke media sosial KPK dengan tema "Dukung Perempuan Cegah Korupsi" dalam rangka memperingati Hari kartini dan tema 17-agustusan.

Pada 2014, media sosial KPK juga mengadakan pertemuan *offline* dengan para pegiat media sosial (*netizen*). Selain dimaksudkan untuk memperkenalkan akun media sosial KPK, pertemuan ini juga untuk memberikan ucapan terima kasih atas dukungan terhadap program antikorupsi sekaligus mengajak untuk terus menyuarakan pemberantasan korupsi di Indonesia melalui dunia maya.

SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2014 terdapat 1 sengketa permintaan informasi publik, yaitu pemohon mengajukan keberatan atas permohonan yang diajukan untuk melakukan penelitian/wawancara. Kemudian dilakukan sidang di KIP, dengan putusan damai. Mahasiswa selanjutnya melakukan wawancara di KPK pada Januari 2015.

KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik selama tahun 2014, beberapa kendala yang dihadapi dalam Pelayanan, pengelolaan maupun pemenuhan Informasi, antara lain.

- Pengumpulan dan pengemasan informasi internal dari masing-masing biro/direktorat untuk dapat menjadi Informasi yang bersifat publik belum optimal.
- Kurangnya SDM dalam pengelolaan saluran-saluran informasi (PIP, ACCH, Perpustakaan, media sosial)
- Surat permintaan informasi publik ditujukan ke unit kerja yang lain, bukan ke PPID/Biro Humas sehingga memerlukan waktu lebih lama sampai ke PIP menunggu disposisi/berjalannya surat.

RENCANA TINDAK LANJUT

Komisi Pemberantasan Korupsi berkomitmen untuk terus memperbaiki Pelayanan Informasi Publik pada tahun-tahun berikutnya. Berikut ini rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2015:

- Melengkapi Pelayanan Informasi Publik dengan *feedback tools* yang memungkinan setiap pengguna/peminta informasi publik langsung memberikan penilaian/feedback atas layanan yang diterimanya dari KPK, baik dari saluran website maupun layanan langsung.
- Inovasi saluran informasi untuk menarik para pengguna saluran layanan informasi publik.
- Pembuatan jurnal antikorupsi, sebagai alternatif lain untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang antikorupsi kepada masyarakat.

LAMPIRAN

LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
TAHUN 2014

BULAN	PEMOHON			MEKANISME PERMOHONAN			JENIS INFORMASI YANG DIMINTA				PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI					SENGKETA INFORMASI
											DIBERIKAN		DITOLAK		DIBERIKAN	
	INDIVIDU	BADAN HUKUM	KELOMPOK ORANG	DATANG LANGSUNG	ELEKTRONIK	NON ELEKTRONIK	PENCEGAHAN	PENINDAKAN	UMUM		SEBAGIAN	SELURUHNYA	DIKECUALIKAN	TIDAK DIKUASAI		
1	106	49	4	8	148	3	11	12	136	159		159			159	
2	114	26	4	19	123	2	9	9	126	144		144			144	
3	123	42	9	37	130	7	18	6	150	174		174			174	
4	116	34	4	5	141	8	14	7	133	154		154			154	
5	215	12	3	2	224	4	10	0	220	230		230			230	1
6	93	15	4	16	91	5	10	2	100	112		111			111	
7	63	5	2	13	56	1	4	2	64	70		70			70	
8	104	22	9	22	107	6	6	0	129	135		135			135	
9	109	23	9	29	107	5	1	3	137	141		141			141	
10	152	37	6	41	141	13	3	6	186	195		195			195	
11	175	58	11	37	192	15	0	0	244	244		244			244	
12	189	47	16	38	211	3	4	2	246	252		252			252	
JUMLAH	1559	370	81	267	1671	72	90	49	1871	2010		2009			2009	1

Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Jl. HR. Rasuna Said, Kav. C-1
Jakarta 12920 Indonesia
Telp. +62 21 2557 8300
Faks. +62 21 52892456

www.kpk.go.id